

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djias, M., & Koosmargono, R. (2011). *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegro.
- Miru, A., & Yodo, S. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, S. A. (2004). *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Samsul, I. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Siahaan, N. (2005). *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofi, Y. (2002). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suherman, A. M. (2004). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2000). *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.

Wahyuni, E. S. (2003). *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. Kamus

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.

C. Makalah dan Jurnal

Miru, A. (2000). Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indones. *Disertasi*.

Woelansari, B. P. (2009). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Disertasi*.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

LAMPIRAN